

**Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, dan Peran Perempuan
Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia**

Purwowibowo^{*)}

Abstract

The population of the world now has more than 6.5 billion peoples, and more than 225.5 millions are citizens of Indonesia. Population growth in Indonesia is still relatively high if that compared to other ASEAN countries. If that is compared by population growth of Europe countries, the Indonesia's population growth are very high. Consequently income per capita is low and thus the people become poorer.

Poverty to be take place if it is not followed by high GDP (Gross Domestic Product). Really, Indonesia has GDP quite large, but the large number of peoples has income per capita are small. Therefore, it is necessary to manages the population growth by involved the role of women in the control of population growth by using of modern contraceptives. In addition, the role of women in the changing socio-cultural views associated with early marriage and the desired number of childrens. In this way the women as the core keys of the lives of families and communities will be able to participate in all aspects of social development, which in turn could improve the social welfare of the whole community.

Keywords : *Population, Poverty, Women and Social Development.*

Abstrak

Jumlah penduduk dunia sekarang lebih dari 6,5 milyar jiwa dan 225,5 jiwa merupakan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Bahkan, jika dibandingkan dengan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk di Eropa, maka jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia sangatlah tinggi. Suatu negara yang jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan per kapitanya menjadi rendah atau kecil dan jika hal ini terjadi maka masyarakatnya menjadi miskin. Hubungan antara jumlah penduduk yang besar dengan

^{*)}Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Jawa Timur

kemiskinan berbanding lurus, karena GDP (Gross Domestic Product) akan dibagi dengan jumlah penduduk.

Di Indonesia sesungguhnya GDP-nya cukup besar, tetapi jumlah penduduknya juga besar, maka pendapatan per kapitanya menjadi kecil. Oleh karena itu, untuk menekan pertumbuhan penduduk diperlukan peran perempuan di dalam pengendalian penduduk, yakni menekan jumlah kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi modern bagi perempuan yang telah berumah tangga dan meningkatkan kualitas hidupnya, yakni pendidikan dan pengetahuannya. Selain itu, juga peran perempuan dalam mengubah pandangan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan dini dan jumlah anak yang dilahirkan. Perempuan sebagai inti penggerak dari kehidupan keluarga dan masyarakat akan bisa berpartisipasi di dalam semua aspek pembangunan sosial yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Penduduk, Kemiskinan, Perempuan dan Pembangunan Sosial.

PENDAHULUAN

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya menghadapi persoalan kependudukan dan kemiskinan, kecuali Singapore dan Brunai Darusalam. Kedua negara mempunyai jumlah penduduk yang relatif kecil sedangkan pendapatan perkapitanya sangat tinggi. Di tahun 2003 para pemimpin ASEAN melalui pertemuan tingkat tinggi pemimpinnya menyepakati dan memutuskan bahwa masyarakat ASEAN (*Asean Communities*) akan diberlakukan pada tahun 2015. Namun, dalam hubungan ini negara-negara anggotanya baru dapat menyepakati dan menerima Piagam ASEAN tersebut ketika berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi

di Singapore di tahun 2007 lalu. Piagam tersebut disempurnakan lagi pada bulan Desember 2008, dengan menetapkan kerangka kerjasama resmi dan kelembagaan, dan selanjutnya dirumuskan tujuan serta prinsip dasarnya. Di antaranya bermaksud untuk: (1) menciptakan pasar dan produksi tunggal yang didasarkan atas kondisi masing-masing negara, kemakmuran, kompetisi yang tinggi dan integrasi perekonomian yang memberikan fasilitas secara efektif untuk perdagangan dan investasi, memberikan fasilitas para pengusaha, profesional, bakat dan tenaga kerja, aliran modal, dan (2) mengurangi kemiskinan dan memperkecil perbedaan pembangunan di antara anggota ASEAN

melalui saling membantu dan bekerja sama (Uriarte, 2009).

Tabel 1
Area and Population

Country	Land (1000 km ²)	Population (million) 2007
Brunei Darussalam	5.8	0.396
Cambodia	181	14.5
Indonesia	1,891	225
Lao PDR	237	5.61
Malaysia	330	27.2
Myanmar	677	58.6
Philippines	300	88.9
Singapore	0.7	4.59
Thailand	513	65.7
Vietnam	329	85.2
ASEAN	4,464	576

Sumber: Filemon A. Uriarte (2009)

Jumlah penduduk Indonesia paling besar di antara negara-negara ASEAN, namun dilihat dari sisi pertumbuhannya, penduduk Indonesia tingkat pertumbuhannya sudah termasuk kecil (1,3%). Hal ini bila dibandingkan dengan Malaysia (1,9%), Filipina ((1,8%), Laos (2,3%), Singapore (1,5%), dan Vietnam (1,4%) pertahun. Sedangkan Thailand lebih rendah yakni mencapai (0,9%). Jika dilihat jumlah penduduknya Indonesia mempunyai jumlah penduduk sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan di atas. Indonesia mempunyai jumlah penduduk 225,5 juta

jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk Malaysia yang hanya 26,9 juta, Laos 6,1 juta, Philipina 86,3 juta, Singapore 4,5 juta, Thailand 65,2 juta, dan Vietnam 84,2 juta. (*Populatiom and Economic Development Linkages 2007 Data Sheet*).

Dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa misalnya jumlah penduduknya tidak terlalu besar dan tingkat pertumbuhannya sangat rendah bahkan ada yang minus. Misalnya Belarus jumlah penduduknya hanya 9,7 juta tingkat pertumbuhannya minus 0,6; Polandia jumlah penduduknya 38,1 tingkat pertumbuhannya minus 0,1; dan Rusia jumlah penduduknya 142,3 juta tingkat pertumbuhannya minus 0,5 (ibid).

Beban jumlah penduduk yang sangat besar itu sudah bisa dipastikan memberi beban perekonomian kepada Indonesia. Karena dengan jumlah sebanyak itu memerlukan berbagai prasarana dan sarana yang cukup banyak serta akan menekan *Gross National Product* suatu negara dan menimbulkan dampak negatif yakni kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari jumlah penduduk yang besar tersebut. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi potensi yang luar biasa jika disertai dengan kualitas sumberdaya itu yang memadai, namun jika kualitasnya

rendah maka sumberdaya manusia itu bukan menjadi potensi tetapi menjadi kendala bagi perkembangan dan pembangunan suatu bangsa. Ujungnya adalah penduduk yang tidak berkualitas akan mengalami kemiskinan. Sesungguhnya kemiskinan merupakan persoalan global umat manusia sampai sekarang ini. Perkembangan perekonomian dunia yang tidak seimbang telah menimbulkan kemiskinan massal, kesenjangan sosial, ekonomi, politik baik antar negara, antar daerah maupun antar kelompok masyarakat.

Masalah kemiskinan akhir-akhir ini muncul kembali ke permukaan setelah krisis ekonomi dan sosial di Indonesia sejak 1998 tidak kunjung berakhir. Menurut BPS 2009 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 32.530.000 (32 juta lebih). Di tahun 2010 sekarang orang miskin bertambah lagi lebih dari 40 juta orang seakan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan tidak bermakna apa-apa. Terkait dengan jumlah orang miskin di Indonesia sesungguhnya berhubungan secara signifikan dengan jumlah penduduk miskin dunia. Pada tahun 1990 World Bank mengeluarkan data penduduk miskin dunia telah lebih dari satu milyar orang (1.116 juta), sudah bisa dipastikan bahwa jumlah ini semakin bertambah

karena perekonomian dunia dan berbagai kerusakan sumber daya alam di berbagai negara semakin parah.

Di Indonesia sendiri indikasi kemiskinan juga terus bertambah seiring dengan berbagai bencana alam, kerusakan lingkungan, dan akhir-akhir ini berbagai harga kebutuhan pokok meningkat sangat tajam (harga kedelai, tepung terigu, minyak goreng, dan sebagainya). Dengan keadaan ini banyak anggota masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokoknya karena berbagai sektor ekonomi riil tidak mampu menambah jumlah tenaga kerja, bahkan banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga banyak tenaga kerja yang menganggur.

Di pedesaan kemiskinan berkorelasi tinggi dengan penguasaan lahan pertanian. Kenyataannya di pedesaan Jawa hampir 60 persen penduduknya tidak memiliki lahan, sedangkan rata-rata luas pemilikan lahan (termasuk sawah dan lahan kering) hanya 0,62 ha (Memed Gunawan,1993). Kemungkinan besar saat ini jumlah kepemilikan semakin sempit lagi karena perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri, perumahan, dan berbagai fasilitas lainnya masih terus berlangsung saat ini. Kenyataan ini mendorong orang desa yang tidak mempunyai lahan sawah dan pekerjaan bermigrasi ke kota untuk

mengadu nasib atau melakukan urbanisasi ke kota-kota terdekat menjadi buruh rumah tangga, buruh pabrik, gelandangan, dan juga pengemis. Fenomena lain yang terjadi di masyarakat desa untuk merubah nasibnya adalah menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI).

Kerangka Teoritis

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan peran perempuan dalam pembangunan sosial di Indonesia. Untuk membahas permasalahan tersebut dikemukakan berbagai pendekatan teoritis atau kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikannya. Pendekatan teoritis tersebut dapat dipakai sebagai alat analisis tentang kondisi sosial dan politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa pendekatan teoritis dan apa pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan peran perempuan akan dianalisis.

1. Pendekatan Teori Evolusi Sosial.

Teori ini dikembangkan oleh Charles Darwin dari suatu perspektif teori yang kompleks dari Herbert Spencer. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya masyarakat selalu mengalami perubahan sosial mulai dari yang sederhana menuju

kondisi masyarakat yang kompleks (Kenny, 2007:78). Pertumbuhan masyarakat dan penambahan penduduk demikian menurut Spencer sebagaimana organisme hidup. Suatu organisme terus mengalami perubahan (*evolusi*) dari yang sangat sederhana menjadi sangat kompleks. Masyarakat dimulai dengan suatu kehidupan dengan unsur-unsur sosial budaya yang sangat sederhana kemudian berkembang menjadi sangat banyak unsur sehingga kehidupan menjadi sangat kompleks. Dengan atas pendekatan ini dapat dikatakan bahwa penduduk yang pada mulanya berjumlah sedikit dan hidup dalam kesederhanaan kemudian berkembang terus menjadi banyak. Banyaknya penduduk tersebut menjadikan kondisi mereka bervariasi dalam kehidupan. Ada yang tercukupi kebutuhannya dan ada pula penduduk dalam kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya penambahan dan pertumbuhan penduduk itulah sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Agar penambahan dan pertumbuhan penduduk yang menjadi sumber terjadinya kemiskinan dapat dikendalikan dan dikurangi, maka perempuan harus dapat berperan di dalam pengendalian tersebut di dalam proses pembangunan sosial.

2. Pendekatan Struktural Fungsional. Di dalam pendekatan ini dikatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kehidupan yang kompleks dan terdiri dari unsur-unsur sosial yang saling pengaruh-mempengaruhi (Kenny, 2007: 78). Unsur-unsur masyarakat tersebut seperti keluarga, organisasi sosial. Fungsi dari unsur-unsur masyarakat tersebut menjadi penjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami pertumbuhan penduduk, terjadinya kemiskinan, peran perempuan di dalam pembangunan sosial juga dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan struktural fungsional ini. Kemiskinan misalnya dapat terjadi manakala unsur-unsur sosial dalam kehidupan masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga ada anggota masyarakat yang mendapatkan bagian lebih banyak dan di sisi lain mendapatkan lebih sedikit. Bagi mereka yang mendapatkan lebih sedikit akan mengalami kemiskinan.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu didayagunakan unsur-unsur sosial yang ada baik melalui keluarga maupun melalui lembaga sosial. Unsur sosial tersebut adalah perempuan yang merupakan bagian penting dari keluarga. Dengan melibatkan perempuan di dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, maka hasilnya akan lebih baik. Perempuan sebagai

unsur penting di dalam keluarga dapat mempengaruhi program-program di dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Pendekatan Feminisme.

Di dalam aliran ini memandang pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan pembangunan sosial dapat dianalisis dari peran yang dilakukan oleh perempuan. Pada dasarnya bahwa perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan sosial. Hal ini karena jumlah perempuan secara statistik memang lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Namun, di dalam kenyataannya partisipasi perempuan di dalam pembangunan masih tergolong rendah. Oleh karena itu, menurut paradigma *Feminisme* memberikan penjelasan bahwa peran perempuan di tengah masyarakat masih sangat terbatas, khususnya di dalam sektor publik. Dengan memahami perbedaan peran perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki, maka menurut pendekatan ini perempuan merupakan titik sentral dari pendekatan *feminsime* tersebut (Kenny, 2007: 80).

Para ahli *Feminisme*, telah banyak melakukan observasi di berbagai negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia bahwa kedudukan perempuan sampai saat ini masih ditempatkan lebih

rendah (*subordinate*) di masyarakat. Secara teoritis perempuan dipandang sebagai bagian yang tidak penting, karena hanya dilihat dari sisi jenis kelamin dan bukannya dilihat dari fungsi sosial yang dapat diperankan perempuan. Sehingga perempuan terekploitasi, tertindas, tertekan, dan terampas hak-hak sosialnya di tengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan kenyataan demikian, para ahli *Feminisme* berusaha memahami kondisi perempuan dengan mengajukan pertanyaan yakni, mengapa perbedaan tipe jenis kelamin tersebut mengemuka dan bagaimana masyarakat membuat kerangka demikian sehingga laki-laki lebih dominan kedudukannya dibandingkan perempuan.

Untuk membahas hal di atas aliran *Feminisme* mempunyai dua konsep yakni *gender* dan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi di masyarakat (*patriarchy*). Konsep *gender* merupakan konsep yang dibangun oleh masyarakat atas situasi, nilai-nilai, sikap dan tamsil (dongeng) bahwa peran laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Kontruksi sosial mengenai *gender* ditentukan melalui bagaimana kita merasakan, bertindak berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Hal ini merupakan prinsip dasar yang dibangun oleh kaum laki-laki sejak jaman dulu untuk mempertahankan dominasinya atas

perempuan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya banyak ditemukan bahwa di tengah kehidupan masyarakat banyak ditemukan kekerasan di dalam keluarga (KDRT) dan kekejaman suami terhadap isteri karena laki-laki merasa mempunyai kedudukan dan dominasi di dalam kehidupan rumah tangganya.

Berdasarkan peran perempuan yang lemah dan rendah tersebut ahli-ahli *Feminisme* berusaha untuk mempelajari dan menjelaskan secara sistematis sifat dasar dari dominasi laki-laki atas perempuan. *Patriarchy* menunjukkan struktur yang mengarah terhadap dominasi tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh ahli *Feminisme* bahwa *patriarchy* merupakan sumber utama dari kedudukan wanita menjadi lebih rendah dan lebih banyak tertindas. Berdasarkan konsep *patriarchy* secara struktural, nilai, dan hubungan sosial sehingga membentuk dan memperkuat kedudukan laki-laki. Dalam kenyataannya perempuan mempunyai kedudukan tidak penting dan tertindas dan hal ini merupakan wujud atau bentuk dari konsep *patriarchy* tersebut.

Konsep utamanya *patriarchy* adalah bahwa perempuan dikonsepsikan ke dalam golongan laki-laki, yakni sebagai 'orang lain' dari laki-laki. Perempuan ditempatkan dalam struktur yang rendah

dan mendapatkan penindasan karena perempuan 'bukan dianggap laki-laki'. Makna dari perempuan tersebut juga ditentukan oleh kaum laki-laki. Sehingga dengan kedudukan demikian laki-laki bisa mendayagunakan perempuan sesuka hatinya dan laki-laki menjadi merasa puas. Selain itu, perempuan dianggap oleh kaum laki-laki sebagai pelengkap kedudukan saja dan tidak melakukan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat.

4. Pendekatan FeminismeLiberal.

Secara historis aliran ini ada hubungannya dengan perkembangan filsafat liberal di akhir abad ke-19 yang memandang bahwa terdapat kondisi kontradiksi antara janji-janji tentang demokratisasi dan kebebasan manusia terhadap kondisi sebagian besar perempuan dalam posisi struktural yang lemah (Kenny, 2007:81). Di akhir abad ke-18 berkembang prinsip dasar kebebasan untuk berbicara, kesamaan kedudukan, dan kebebasan dalam berpolitik yang merupakan perkembangan dan kemajuan penting bagi individu untuk memperjuangkan posisi perempuan. Oleh karena itu, aliran *Feminismeliberal* ingin melakukan perubahan masyarakat dan memperbaiki sistem sosial, terutama posisi perempuan

yang berada di dalam struktur yang terpinggirkan (*subordinate*).

Guna mempelajari posisi perempuan tersebut aliran ini menelusuri dari segi hukum, hubungan sosial, dan kebiasaan-kebiasaan sehingga membatasi serta menghalangi perempuan untuk melakukan perubahan di dalam mencapai keberhasilan. Aliran ini menjelaskan bahwa perempuan dalam posisi tidak berdaya demikian disebabkan karena adanya upaya tersembunyi dari norma yang berlaku dan oleh kaum laki-laki memang secara sengaja memasukkan perempuan ke dalam perangkap publik dari dunia laki-laki. Dengan kondisi demikian potensi yang dimiliki dan kebutuhan-kebutuhan sosial perempuan tidak dapat tercapai. Pada akhirnya wanita itu sendiri yang diposisikan demikian oleh kaum laki-laki tidak menyadari tentang kemampuan yang dimiliki dan kebutuhan yang diinginkan.

Atas dasar kenyataan tersebut aliran *FeminismeLiberal* melakukan perlawanan melalui perjuangan di dalam keberadaan hukum agar perempuan dijamin hak-hak sosialnya di tempat kerja baik dalam saat mengandung (hamil) maupun upah yang diterima. Selama ini kedua hal tersebut tidak pernah mendapatkan penghargaan dari kaum laki-laki di tengah masyarakat. Selain itu, aliran ini juga berusaha untuk

memperjuangkan kedudukan dan posisi perempuan di dalam pekerjaan yang secara tradisional dikuasai oleh laki-laki. Semua upaya tersebut dilakukan melalui program yang memberi kesempatan sama bagi perempuan dan laki-laki dengan didukung oleh suatu peraturan perundangan tentang anti-diskriminasi.

Selain itu, aliran ini juga berusaha untuk menekankan pentingnya pengaruh sosialisasi mengenai pengembangan peran yang didasarkan atas jenis kelamin, sikap-sikap, dan perilaku yang mengarah terhadap terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menghapuskan sistem pembelajaran tradisional yang membedakan antara peran yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Melalui program demikian akan dapat meningkatkan posisi perempuan, penghargaan, daya saing perempuan di antara perempuan dan laki-laki. Melalui lembaga pendidikan dan dengan kurikulum yang dibangun dan dikembangkan peran perempuan yang selama ini hanya berkisar di sektor domestik dapat berkembang untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan dan dapat memasuki sektor publik.

5. Pendekatan Feminisme Postmodern

Aliran ini dimulai ketika sejumlah perempuan mulai menyadari tentang kondisi yang dialami selama ini. Ahli-ahli *feminisme* tradisional memandang bahwa konstruksi yang dibangun hanyalah berdasarkan pandangan perempuan kulit putih, golongan menengah (Kenny, 2007:84). Mereka merupakan representasi dari pandangan tentang penindasan sebagai suatu pandangan yang benar, dan selain itu kemudian menyampaikan kepada semua perempuan di seluruh dunia. Aliran ini mengkritik dan cenderung menggambarkan pandangan *postmodern* yang berbeda dan beragam.

Postmodern Feminisme menolak adanya pandangan bahwa perempuan mempunyai ciri-ciri yang secara alamiah berbeda dengan laki-laki. Aliran ini lebih menekankan teori yang mencakup teori *feminisme*, secara umum meliputi berbagai aspek yang ada pada kehidupan perempuan. Perbedaan adalah bahwa pendekatan *postmodernfeminisme* ini memandang bahwa unsur-unsur teori sebelumnya sulit digunakan dan tidak banyak artinya. Bahkan aliran-aliran sebelumnya dianggapnya sebagai suatu yang tidak mengandung kebenaran, hanya melihat kelemahan manusia, dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Oleh karena itu, ahli-ahli aliran ini lebih menekankan bagaimana

masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun, pandangan aliran *postmodernfeminisme* ini juga sulit dilaksanakan karena tidak menganjurkan adanya nilai-nilai, prinsip dasar, moral dan bahkan teori yang cenderung dianggap keramat. Menurut aliran ini, tanpa itu semua, perempuan dengan sendirinya akan menjadi bebas untuk memilih apa yang menjadi kebutuhannya sendiri.

Akhirnya berdasarkan pendekatan *feminisme*, *liberalfeminisme*, dan *postmodernfeminisme* dapat digunakan sebagai kerangka di dalam membahas peran perempuan berkaitan dengan pembangunan sosial. Paling tidak selama ini bahwa pembangunan sosial hanya dipahami dari sisi teori dan praktis saja. Dengan menggunakan sisi lain yakni melihat peran yang dimainkan oleh perempuan dari pendekatan *feminisme*, maka hal-hal yang selama ini dilakukan di dalam pembangunan sosial khususnya peran perempuan dapat ditingkatkan akselerasinya untuk menekan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan guna mengurangi jumlah kemiskinan.

1. Pandangan Konsep Kemiskinan

Konsep “kemiskinan” secara etimologis, berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba

kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Frank Ellis (dalam Suharto, 2005), menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*).

Konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Penny (1990:140) mendefinisikan kemiskinan absolut dalam kaitannya dengan suatu sumber-sumber materi, yang dibawahnya tidak ada kemungkinan kehidupan berlanjut; dengan kata lain hal ini adalah tingkat kelaparan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan yang didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu negara. World Bank (2003) menyusun ukuran kemiskinan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan, yaitu dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok: (1) kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Untuk menentukan ukuran kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Kesulitan tersebut bukan hanya pada indikator apa yang akan digunakan, akan tetapi juga bagaimana menggunakan indikator tersebut pada suatu individu, keluarga, kelompok orang atau masyarakat. Untuk mempermudah bagaimana mengukur kemiskinan tersebut, kemudian muncul konsep *poverty line* (garis kemiskinan).

Pada mulanya orang berpendapat bahwa kemiskinan di dunia ini

disebabkan oleh eksploitasi negara kaya terhadap negara miskin. Pada masa penjajahan misalnya, orang beranggapan bahwa negara penjajah untuk kemajuan ekonomi di negara asalnya mereka mengeruk kekayaan alam negara jajahannya. Selanjutnya dalam Pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara jajahan menjadi negara merdeka. Pada saat itu, pergerakan perjuangan politik negara berkembang menjadi sangat dominan, sehingga konstalasi ekonomi dunia mulai berubah. Banyak negara bekas jajahan mulai membangun perekonomiannya atas landasan kekuatan dalam negerinya. Untuk menambah sumber dana pembangunan perekonomiannya, negara yang baru merdeka tersebut mulai meningkatkan ekspornya ke negara maju. Selain itu juga ada upaya untuk menekan impor dengan cara memenuhi kebutuhan dengan memproduksi sendiri, maka di berbagai negara baru itu mendengarkan konsep industrialisasi.

Sesuai dengan tingkat kemampuan penguasaan teknologi yang ada, maka banyak negara itu hanya mengolah hasil-hasil pertanian dan pertambangan yang masih setengah jadi, yang kesemuanya itu dijadikan bahan baku bagi industri di negara maju. Dengan kenyataan ini maka yang memperoleh nilai tambah (*value added*) adalah negara maju, sedangkan

negara pengekspor memperoleh keuntungan yang sangat kecil. Negara-negara berkembang hanya mengekspor produk setengah jadi dan hal itu sangat ditentukan oleh kepentingan negara industri. Ketimpangan inilah yang mengakibatkan negara-negara berkembang sulit beranjak dari kemiskinannya.

Adanya ketimpangan perekonomian dunia itu sesungguhnya tidak saja merugikan negara berkembang tetapi juga mempunyai dampak negatif pada negara-negara maju. Kerjasama negara maju dan negara berkembang dengan cara pemberian modal merupakan salah satu upaya untuk membantu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Bantuan resmi ODA (*Official Development Assistance*) dari negara maju kepada negara berkembang pada umumnya diatur melalui perjanjian bilateral dan multilateral, atau disalurkan melalui lembaga-lembaga internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*).

Di Indonesia sendiri berbagai bantuan lembaga keuangan internasional itu untuk sementara waktu telah menumbuhkan perekonomian, tetapi sesungguhnya berbagai bantuan itu telah menyeret Indonesia ke dalam jurang

industri mampu mengupayakan perluasan pasar produk hasil industrinya, sedangkan ketergantungan lembaga donor. Bantuan-bantuan itu terkadang dilatar-belakangi kepentingan politik tertentu, terutama dari lembaga donor tersebut.

Dari indikator pendapatan perkapita (GNP per kapita), terlihat bahwa selisih antara negara terkaya dengan negara termiskin adalah 32600 US dollar, atau pendapatan perkapita negara terkaya adalah 409 kali pendapatan perkapita negara termiskin. Jurang pemisah antara keduanya cenderung semakin melebar dari waktu ke waktu, mengingat negara maju terus tumbuh dengan mantap, sedangkan negara miskin terseok-seok dalam pertumbuhannya.

Dari tabel di bawah nampak bahwa secara umum ada keselerasan antara peningkatan pendapatan perkapita dengan meningkatnya umur harapan hidup, serta menurunnya persentase buta huruf, dan tingkat kematian bayi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita akan cenderung memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Indonesia bila dibandingkan dengan enam negara lainnya merupakan negara yang paling terpuruk, yang pendapatannya perkapitanya paling rendah (570), umur harapan hidupnya paling sedikit (62), tingkat buta hurufnya paling besar (23%),

dan kematian bayinya masih sangat tinggi (61/1000). Untuk mengejar ketertinggalannya Indonesia harus memperbaiki kualitas sumberdaya manusiakalau inginsejajar dengan

Tabel 2.

Daftar Beberapa Negara Asean dan Beberapa Negara Maju Menurut Pendapatan Perkapita, Umur Harapan Hidup, Persentase Buta Huruf, dan Tingkat Kematian Bayi

Negara GNP per Kapita	US Dollar	UmurHarapn Hidup (tahun)	Tingkat Buta Huruf (persen)	Tingkat Kematian Bayi (per 1000)
Indonesia	570	62	23	61
Filipina	730	64	10	41
Thailand	1420	66	7	27
Australia	17000	77	f	8
USA	21790	76	f	9
Jepang	25430	79	f	5
Swis	32680	78	f	7

Sumber: World Bank 1992.

Keterangan : f (data menunjukkan kurang dari 5 %)

negara Asean lainnya. Dibandingkan dengan negara-negara di Asean, Indonesia masih tertinggal jauh dari Filiphina, dan Malaysia. Mereka sudah mencapai pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama, sedangkan Indonesia masih memprogramkan wajib belajar 9 tahun beberapa waktu yang lalu. Kondisi ini menyebabkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih rendah dilihat dari tingkat pendidikannya.

2. Peran Perempuan dalam Pembangunan Sosial (*Social Development*)

Di dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) ditemukan istilah pembangunan yang berarti suatu kegiatan atau proses kegiatan, proses pertumbuhan, proses perkembangan, atau proses kemajuan yang terus meningkat derajatnya, meninggalkan yang stagnan menuju suatu keadaan yang lebih maju karena kegiatan, pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan itu.

Pengertian pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo, 1985), proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: *Pertama*, adanya input, yaitu bahan masukan

konversi; *kedua*, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk "mengolah" bahan masukan; *ketiga*, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.

Sedangkan pembangunan sosial menurut Gandhi (1947) adalah "*Social Development is the sum total of the personal development of all people in a society, accompanied by a new social order which will permit and facilitate that occurrence*" (Pembangunan Sosial adalah "pembangunan secara keseluruhan bagi semua orang di masyarakat yang diikuti dengan keteraturan baru (*social order*), yang munculnya kesepakatan itu disepakati dan difasilitasi oleh semua orang, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan).

Pembangunan sosial adalah proses besar yang meliputi banyak aspek/segi yang melibatkan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga sosial, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidakmerataan, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan mengatasi masalah sosial lainnya. Pembangunan sosial intinya adalah keseluruhan perubahan sosial terhadap semua sistem sosial,

terpenuhinya pembangunan bagi semua manusia di semua tingkatan. Tujuannya adalah membangun, mengembangkan, memperbesar kesempatan manusia dalam pembangunan. Sedangkan menurut Midgley (1995), pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai pendekatan kesejahteraan sosial yang mengemukakan suatu langkah efektif dalam mengatasi masalah sosial saat ini, termasuk masalah kependudukan, kemiskinan, dan distorsi pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inti pembangunan sosial adalah pembangunan masyarakat secara keseluruhan (*integrated/holistik*). Pembangunan Sosial tidak hanya mementingkan terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat. Menurut Korten (1984) ciri utama pembangunan sosial adalah pembangunan yang berpusat/berfokus pada manusia (*people centered development*).

Proses pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (*output*) pembangunan, kualitas dari output pembangunan tergantung pada bahan masukan (*input*), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan

masuk pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM), yang dalam bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan (*as object*).

Manusia sebagai sasaran dan pelaku pembangunan merupakan fokus dan lokus dari pembangunan. Manusia sebagai sasaran diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sedangkan sebagai pelaku pembangunan adalah terjadi suatu aktivitas yang demokratis-partisipatif dari mulai identifikasi kebutuhan (*need assesment*), perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pengendalian, sehingga akuntabilitas dan transparansi terjadi secara simultan, *Good Governance* dan *Clean Government* yang kita cita-citakan secara perlahan tapi pasti dapat kita raih.

Faktor manusia memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan proses pembangunan. Manusia oleh beberapa ahli disebut sebagai makhluk sosial, dan bersifat dinamis, diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup menyendiri, selalu membutuhkan hubungan sosial dengan manusia lainnya,

atas hubungannya tersebut menghasilkan sistem nilai yang baku di masyarakat. Sistem nilai adalah budaya, yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai akibat hubungan sosial dan proses adaptasi dengan kondisi alam dan lingkungan di sekitarnya. Ketika mengartikan manusia sebagai subjek dan objek dari proses pembangunan, maka identifikasi dari identitas, ciri, dan kekhasan komunitas menjadi teramat penting. Pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi faktor SDM sebagai input pembangunan dan kondisi SDM sebagai sasaran atau objek pembangunan. Sehingga kekhawatiran pelaksanaan proses pembangunan yang salah sasaran atau tidak tepat tidak akan terjadi.

Istilah pembangunan manusia (*human development*) diadopsi dari UNDP (*United Nation Development Program*, 2001) yang batasannya sebagai berikut: Pembangunan manusia sesungguhnya (esensinya/hakekatnya) adalah (1) pembangunan orang/manusia, (2) pembangunan bersama orang/manusia, (3) dan pembangunan untuk orang/manusia. Adalah suatu pembangunan yang bermaksud untuk mempertinggi kemampuan orang secara langsung (*human capacity building*) dan menggunakan lingkungan sosial mereka agar bisa meningkat derajat sosialnya

setinggi mungkin. Yang dimaksud adalah orang-orang/manusia itu sendiri yang pembangunan di semua tingkatan (*human participation*), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan *maintain* hasil pembangunan itu. Adalah semua proses pembangunan harus bermanfaat (berhasilguna) bagi sebanyak mungkin orang, bukan orang perorang atau kelompok orang tertentu.

Melihat bahwa pembangunan sosial sesungguhnya berpusat pada manusia (*human capacity building*), maka dalam hal ini tidak kalah pentingnya adalah

lebih banyak terlibat dalam proses peran perempuan dalam proses pembangunan sosial secara keseluruhan. Perempuan memegang peran penting dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sosial ditentukan oleh partisipasi perempuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang dilaksanakan suatu negara.

Tabel 3.

Hubungan antara *Gross Domestic Product*, Pendapatan Per Kapita, Penggunaan Kontrasepsi Modern bagi Perempuan, dan Persentasi Perempuan yang Memasuki Sekolah Lanjutan Pertama.

Negara	Gross Domestic Product	Pendapatan Per Kapita	Penggunaan Kontrasepsi Modern	Persentase Perempuan yang sekolah (SMP)
Indonesia	721,616	3,316	57	64
Malaysia	235,112	9,444	30	81
Laos	10,401	1,796	29	39
Philipina	346,105	4,241	33	90
Singapore	109,417	25,804	55	-
Thailand	473,561	7,435	79	74
Vietnam	207,263	2,523	66	72

Sumber: USAID, *Population and Economic Development Linkages 2007 Data Sheet*

Dari tujuh negara Asean di atas sesungguhnya pendapatan dari Produk Domestik sangat tinggi dibandingkan

dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Malaysia misalnya Indonesia, GDP-nya tiga kali lipatnya. Sehubungan dengan

jumlah penduduk Indonesia sangat besar yakni 225, 5 juta, maka pendapatan per kapitanya menjadi sangat kecil dibandingkan dengan Malaysia. Pendapatan per kapita di Malaysia mencapai 9,444 dollar sedangkan di Indonesia hanya 3,316 dollar saja atau hanya sepertiga dari pendapatan perkapita penduduk Malaysia. Pendapatan perkapita di Indonesia masih lebih baik bila dibandingkan dengan Laos dan Vietnam, yang pendapatan per kapitanya hanya 1,796 dollar dan 2,523 dollar.

Pendapatan per kapita memang belum menunjukkan kemakmuran suatu masyarakat dalam suatu negara, tetapi indikator kesejahteraan dengan menggunakan pendapatan per kapita setidaknya memberikan gambaran umum tentang kemakmuran suatu negara. Pendapatan per kapita tinggi jika tidak diikuti dengan pemerataan bagi seluruh masyarakatnya, bisa jadi GDP hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Sedikit masyarakat memperoleh pendapatan per kapita sangat tinggi, sedangkan sebagian besar lainnya memperoleh pendapatan per kapita sangat sedikit. Ketimpangan ini di Indonesia masih nampak jelas dihadapan masyarakat Indonesia.

Sesungguhnya peran perempuan Indonesia dalam pengendalian

pertambahan jumlah penduduk sudah cukup bagus, karena bila dilihat dari jumlah perempuan menikah yang telah menggunakan alat kontrasepsi modern untuk mencegah terjadinya kehamilan cukup tinggi. Dari tabel di atas tampak bahwa perempuan Indonesia yang menggunakan kontrasepsi mencapai 57 %. Data ini lebih baik bila dibandingkan dengan negara Malaysia, Philipina, Laos, dan Singapura yang penggunaan alat kontrasepsi modern wanitanya hanya 30 %, 29%, 33%, dan 55 %. Namun bila dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam, maka penggunaan kontrasepsi modern oleh perempuan Indonesia masih dibawah kedua negara tersebut.

Kalau dilihat dari jumlah penduduknya yang belum mencapai 100 juta jiwa, maka Thailand dan Vietnam sudah menerapkan kebijakan anti-natalitas yang ketat. Oleh sebab itu Indonesia perlu kembali menerapkan kebijakan yang lebih ketat tentang penggunaan alat kontrasepsi modern ini agar pertumbuhan penduduk yang terus melaju dengan cepat dapat dikendalikan, karena sekarang ini jumlah penduduk Indonesia telah lebih dari 225 juta jiwa (BPS, 2010). Suatu jumlah yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dua negara ASEAN yang masih menerapkan kebijakan *pro-natalis* adalah Malaysia dan

Singapura. Kedua Negara ini perlu menambah jumlah penduduknya karena Malaysia masih merasa bahwa jumlah penduduknya masih kurang- dan jumlah penduduknya yang lebih dari 26 juta jiwa – dan perlu masih menambah jumlah penduduknya. Penduduk Malaysia masih terus meningkat, sedangkan di Singapura meskipun sama-sama menerapkan kebijakan *pro-natalis*, di negara itu disebabkan karena perempuan di sana tidak mau melahirkan anak dan lebih senang meniti karier yang lebih tinggi, sehingga jumlah fertilitasnya memang menurun bila dibandingkan dengan jumlah kematiannya.

Berkaitan dengan tingkat fertilitas ini, Indonesia masih sangat besar pengaruh sosial budaya terhadap suatu keluarga. Di negara maju, setiap keluarga dalam berumah tangga tidak diikuti dengan kelahiran anak-anaknya. Berkeluarga bagi mereka adalah pemenuhan kebutuhan biologis semata, sehingga kehadiran anak dianggap merepotkan dan mengganggu kehidupan berkeluarga. Anak menjadi beban yang sangat berat bagi suatu keluarga. Sedangkan di Indonesia sebaliknya, karena setiap keluarga belum lengkap jika belum hadir anak-anak dari keluarga tersebut. Bahkan setiap orang jika ketika di antara mereka (yang sudah akrab dan juga yang belum) yang ditanyakan

pertama kali tentang keluarga, berapa banyak anak yang dipunyai, dan seterusnya.

Bahkan ada suatu keluarga (suami-isteri) bercerai karena tidak dikaruniai atau tidak hadirnya anak di-tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, agar penduduk Indonesia terkendali pertumbuhannya, karena jumlah 225 juta lebih cukup banyak, maka para wanita yang baru berumah tangga harus mengendalikan jumlah kelahirannya dengan menggunakan alat kontrasepsi modern. Atau filosofi lama yang mengatakan bahwa "*banyak anak-banyak rejeki*" harus ditinggalkan jauh-jauh.

Kalau mungkin sekarang pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kependudukan seperti di negara Cina yakni setiap keluarga hanya diperkenankan mempunyai satu orang anak saja. Kalau ini bisa berjalan maka pertumbuhan penduduk bisa nol persen, sehingga penduduk Indonesia akan stagnan pada jumlah 250 juta jiwa. Peran perempuan sangatlah penting untuk pengendalian kependudukan ini mengingat bahwa pemegang kendali kelahiran dalam suatu rumah tangga adalah seorang perempuan.

Jumlah kelahiran ini berhubungan erat dengan tingkat pendidikan perempuan di suatu negara. Dilihat dari jumlah perempuan yang bersekolah di

sekolah lanjutan tingkat pertama, Indonesia menempati urutan nomor 2 dari bawah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Artinya tingkat pendidikan perempuan Indonesia masih rendah hal ini tampak bahwa perempuan yang memasuki sekolah pertama persentasenya masih 64 %, sedangkan yang terendah adalah Laos yang hanya 39 %. Namun, jika dibandingkan dengan Malaysia 81%, Philipina 90%, Thailand 74%, Vietnam 72%, dan Singapura 100%.

Di Indonesia tingkat pendidikan yang rendah bagi perempuan juga berkaitan dengan fertilitas yang tinggi. Pada masyarakat pedesaan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP misalnya akan segera menikah. Hal ini menjadikan masa subur mereka menjadi panjang dan kemungkinan jumlah fertilitasnya (kemampuan melahirkan) anak panjang dan kemungkinan jumlah anak yang akan dilahirkan menjadi banyak. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mewajibkan usia sekolah bagi perempuan dan laki-laki yang mencapai 9 tahun merupakan langkah menekan jumlah perkawinan di usia muda dan jumlah fertilitasnya.

Berbagai kendala menghadang kebijakan di atas, seperti misalnya perlunya berbagai fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan

wajib belajar sembilan tahun bagi perempuan, serta faktor sosial-budaya masyarakat. Faktor yang terakhir ini yang sangat sulit dikendalikan, karena di masyarakat pedesaan sampai sekarang masih ada perasaan "malu" jika mempunyai anak perempuan tidak segera menikah. Lebih baik menjadi janda daripada tidak menikah sama sekali. Anggapan masyarakat jika anak perempuan sudah besar tidak menikah tidak laku, dan lain sebagainya masih berkembang di masyarakat pedesaan. Di masyarakat pedesaan Situbondo kebiasaan orang tua menikahkan anaknya di usia muda masih terus berlangsung, ada istilah "*lulus SD plus*", yakni anak perempuannya setelah lulus SD kemudian dikirim ke pondok pesantren untuk beberapa waktu, bisa dua sampai 5 bulan dan kemudian dibawa pulang untuk dinikahkan (Purwowibowo, 2008).

Di Philipina yang secara ekonomi sebanding dengan Indonesia tingkat pendidikan perempuannya sudah sangat baik, karena jumlah perempuan yang memasuki sekolah lanjutan tingkat pertama mencapai 90%. Di negara itu berarti bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan paling rendah adalah sekolah lanjutan pertama. Sedangkan di Indonesia masih separuh wanita belum menikmati pendidikan lanjutan pertama. Jika perempuannya bisa berpartisipasi di

dalam semua aspek pembangunan, maka semua rencana pembangunan itu akan nampak hasilnya.

Oleh karena itu, pembangunan sosial tiada lain adalah pembangunan manusia seutuhnya atau bisa dikatakan sebagai pembangunan kemampuan dan kualitas manusia (*capacity building*). Jika Indonesia ingin terbebas dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, kemiskinan dan kemeralatan, maka pembangunan sosial terutama peningkatan kualitas kehidupan perempuan harus menjadi prioritas utama. Karena perempuan menjadi *core* (inti) dari semua persoalan pembangunan.

Kesimpulan

Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di Indonesia yang mencapai 1,3% perlu diturunkan lagi menjadi kurang dari 0,5% atau kalau bisa pertumbuhan penduduk Indonesia 0% sehingga jumlah penduduknya akan stabil 225,5 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menekan GDP suatu negara, hal ini terjadi di Indonesia yang sesungguhnya GDP-nya besar dan jumlah penduduknya juga besar, maka pendapatan per kapitanya menjadi kecil. Jika suatu negara rendah pendapatan per kapitanya maka negara dan masyarakatnya tergolong miskin.

Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sosial terutama peran perempuan di dalam setiap proses pembangunan. Peran perempuan menjadi sentral karena bisa mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan keadaan suatu negara. Perempuan harus ditingkatkan kualitasnya agar mereka sebagai patron kehidupan masyarakat bisa memberikan wahana bagi keberhasilan pembangunan secara keseluruhan (pembangunan sosial).

Daftar Pustaka

- BPS. 2009. *"Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi"*. Penduduk Miskin Indonesia.
- BPS dan Depsos, 2002. *Konsep Kemiskinan*.
- BPS. 2010. *Sensus Penduduk 2010*.
- Budihardjo, Meriam 1985. *Pengantar Ilmu Politik*. Gramedia Jakarta.
- Cox, David, 2001, *Social Development*. Materi Lokakarya Nasional Pengembangan Materi Pembangunan Sosial dalam

- Kurikulum Pendidikan Pekerjaan Sosial, FISIP UI-La Trobe University Australia.
- Ellis, Frank dalam Suharto, 2005
- .Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.**“Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan”.
- Gandhi, Mahatma (1947) dalam Cox, David 2001 *Social Development*. Materi Lokakarya Nasional Pengembangan Materi Pebangunan Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Pekerjaan Sosial, FISIP UI-La Trobe University Australia.
- Gunawan, Memed dan Erwidodo.1993, *”Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan”*, *Prisma*, No. 3, Tahun XII, 1993
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) 1999.Balai Pustaka Jakarta.
- Kenny. S. 2007. *Development Communities For The Future*. Australia. Thomson.
- Korten, D.C. 1984. *People Centered Development, Contribution toward Theory and Planning Frameworks*. USA. Kumarian Press.
- Midgley, James, 1995.*Social Development*.Sage Publication. London
- Penny, D H . 1990. **Kemiskinan : Peranan Sistem Pasar** . Universitas Indonesia. Jakarta.
- Purwowibowo, 2008. *“Kultur Pendidikan dan Etos Kerja Komunitas di Wilayah Tapal Kuda Pendalungan”*Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Suharto, Edy. 2005. **Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.** “Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan”
- UNDP 2001. Annual Report.
- Uriarte, Filemon A. Jr., Executive Director, ASEAN Foundation, *Paper*, Presented During the Conference on “Competitiveness of ASEAN Countries: Trade and Investment Issues” Held at the National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, 8-9 January 2009.

USAID, 2007. *Population and Economic
Development Linkages, Data
Sheet.*

